

Penerapan Komunikasi Partisipatif dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih

Delfiana Da Costa^{1*}, Ni Made Gandhi Sanjiwani²

^{1,2} Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Bali Dwipa, Indonesia

Alamat: Jl. Pulau Flores No.5, Dauh Puri Klod, kec. Denpasar Bar., Denpasar

Korespondensi penulis: delfianadacosta@gmail.com

Abstract. *This study aims to explore and analyze the mechanisms of participatory communication in community-based tourism development, with a focus on strengthening community participation and understanding the dynamics of communication in community-based tourism development in Jatiluwih Tourism Village. The study employs a descriptive qualitative approach, using purposive sampling techniques. Jatiluwih Tourism Village was selected due to its status as a UNESCO World Cultural Heritage Site since 2012 and its significant potential for community-based tourism development, despite the community participation remaining suboptimal. Key informants include community leaders, tourism village managers, and community members directly involved in managing tourism based on local wisdom. Primary data were collected through observation and in-depth interviews, while secondary data were obtained from relevant documents and reports. Data validity was ensured through triangulation by comparing interview results, observations, and documents. The findings reveal that participatory communication—through access, voice, and control—plays a crucial role in the development of community-based tourism in Jatiluwih Tourism Village. While it has had positive impacts, gaps in control highlight the need for more inclusive mechanisms to ensure equitable community participation. This study underscores the importance of applying participatory communication to realize inclusive and sustainable community-based tourism.*

Keywords: *Community-Based Tourism, Jatiluwih Tourism Village, Participatory Communication*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme komunikasi partisipatif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan fokus pada penguatan partisipasi masyarakat serta dinamika komunikasi dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel *purposive*. Desa Wisata Jatiluwih dipilih karena statusnya sebagai warisan budaya dunia UNESCO sejak 2012, dengan potensi tinggi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, meskipun partisipasi masyarakatnya belum optimal. Informan kunci terdiri dari tokoh masyarakat, pengelola desa wisata, dan anggota komunitas yang terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan yang relevan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif melalui akses, *voice*, dan kontrol berperan penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Meski memberikan dampak positif, kesenjangan kontrol menunjukkan perlunya mekanisme lebih inklusif untuk memastikan partisipasi masyarakat yang merata. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan komunikasi partisipatif untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pariwisata Berbasis Masyarakat, Desa Wisata Jatiluwih, Komunikasi Partisipatif

1. LATAR BELAKANG

Pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, menghadapi kompleksitas tantangan yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. Desa Wisata Jatiluwih, sebagai salah satu destinasi unggulan Bali yang telah diakui secara internasional sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 2012, menjadi representasi konkret dari dinamika pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang memerlukan perhatian mendalam.

Realitas empiris menunjukkan bahwa meskipun konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat atau *Community-Based Tourism* (CBT) telah lama diwacanakan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Priyandoko dkk., (2023) dalam penelitiannya secara eksplisit mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih masih berada pada tingkat yang sangat rendah. Kondisi ini ditandai dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan destinasi wisata, meskipun mereka adalah pemilik otentik lanskap budaya dan sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama. Fenomena di lapangan semakin memperjelas masalah ini, di mana ruang untuk masyarakat setempat dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih semakin terbatas. Data menunjukkan bahwa partisipasi mereka hanya sebesar 10%, jauh lebih kecil di bandingkan dengan peran pemerintah yang mencapai 60% dan pengusaha sebesar 30%. Meskipun proporsi keterlibatan masyarakat kecil, perannya tetap esensial dalam menjaga kelestarian budaya lokal, masyarakat memainkan peran penting dalam pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan sehari-hari desa. Tanpa partisipasi aktif mereka, nilai budaya dan sosial desa berisiko tergerus, yang dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang destinasi wisata ini.

Kompleksitas rendahnya partisipasi masyarakat ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut, terutama terkait strategi yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan relevan adalah komunikasi partisipatif, yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan ini penting untuk pembangunan berpusat pada manusia. Hal ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire, yang memandang komunikasi sebagai kunci pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan egaliter (Kustiawan dkk., 2023).

Berbagai studi sebelumnya telah mencoba mengeksplorasi strategi peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai pendekatan. Meskipun peran pemerintah, kepemimpinan, dan sektor terkait telah diakui penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, hasilnya belum maksimal dalam meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian Dewi dkk. (2013) dan Wesnawa (2022) memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Namun, fokus pada komunikasi partisipatif sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan masyarakat masih terbatas.

Dalam konteks ini, komunikasi partisipatif bukan hanya dilihat sebagai metode komunikasi semata, melainkan sebagai filosofi pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pengembangan. Rakhmadani (2021) menegaskan bahwa komunikasi partisipatif memiliki potensi transformatif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran, rasa memiliki, dan tanggung jawab masyarakat terhadap inisiatif pembangunan pariwisata. Keunikan studi ini terletak pada fokus mendalam terhadap mekanisme akses, *voice*, dan kontrol dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif atau evaluatif, penelitian ini akan mengeksplorasi secara komprehensif dinamika komunikasi partisipatif dalam kerangka pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Beberapa penelitian terdahulu meskipun memberikan kontribusi teoritis, dianggap belum mampu mengungkapkan kompleksitas sebenarnya dari partisipasi masyarakat (Tiaraningrum, 2023). Studi ini akan melangkah lebih jauh dengan menganalisis bagaimana mekanisme komunikasi partisipatif dapat secara efektif membuka ruang dialog, negosiasi, dan pengambilan keputusan bagi masyarakat lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan komunikasi partisipatif melalui akses, *voice*, dan kontrol dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme komunikasi partisipatif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan fokus pada penguatan partisipasi masyarakat serta dinamika komunikasi yang terjadi dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran komunikasi dalam memperkuat partisipasi masyarakat, serta kontribusi komunikasi partisipatif dalam meningkatkan kesadaran, rasa memiliki, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di desa tersebut. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Komunikasi Partisipatif Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Komunikasi partisipatif adalah pendekatan yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Dalam konteks *Community-Based Tourism* (CBT), komunikasi partisipatif menjadi pendekatan strategis yang sangat penting. Secara spesifik, dalam

proses implementasi CBT, di mana *spirit* utamanya adalah peningkatan partisipasi masyarakat, komunikasi partisipatif menjadi pendekatan kunci yang diperlukan untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat secara aktif (Putra dkk.,2023).

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi efektivitas komunikasi partisipatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pengembangan, dengan salah satu fokus utamanya adalah pengembangan desa wisata. Penelitian Rakhmadani (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat. Studi Dewi dkk. (2013) di Desa Jatiluwih, Bali secara khusus menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan desa wisata.

Community-Based Tourism (CBT) merupakan konsep yang memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk mengontrol dan mengarahkan pengembangan pariwisata. Dalam pendekatan ini, masyarakat memiliki akses, *voice*, kontrol yang signifikan, yang secara fundamental muncul dalam pola komunikasi partisipatif. Masyarakat tidak sekedar menjadi objek, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kendali penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Substansi komunikasi partisipatif mencakup tiga aspek utama, yaitu akses, *voice*, dan kontrol. Pertama, akses berarti kesempatan dan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses *governance*, mempengaruhi kebijakan, serta berpartisipasi dalam pengelolaan barang publik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuka ruang bagi masyarakat, terutama kelompok marginal, dan merespons gagasan serta kebutuhan mereka dalam merumuskan kebijakan bersama. Kedua, *voice* merujuk pada hak dan tindakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan dan mengelola kehidupan secara kolektif. Ketiga, kontrol mencakup kemampuan masyarakat untuk mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah, serta melakukan penilaian kritik terhadap potensi risiko. Kontrol internal (*self-control*) juga sangat penting, mengingat sejarah penindasan yang terjadi dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di masyarakat, di mana yang di atas menindas yang bawah dan yang paling bawah saling menindas sesama mereka (Sutoro Eko, 2004).

Penelitian Priyandoko dkk. (2023) mengungkapkan tantangan partisipasi masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih, yang menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif. Widiastuti *at al.* (2022) merekomendasikan beberapa intervensi untuk meningkatkan partisipasi, seperti: desain program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas

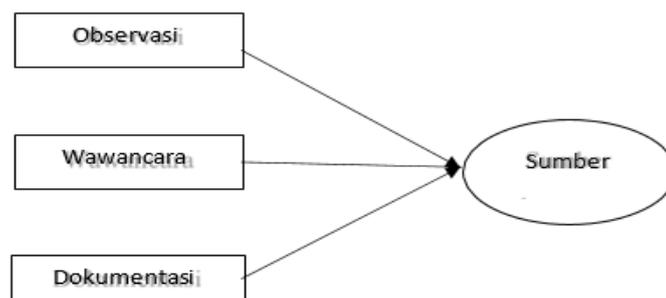
masyarakat, pembentukan mekanisme pengambilan keputusan partisipatif, pengembangan strategi komunikasi yang menjangkau seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian komunikasi partisipatif dalam konteks CBT mempromosikan masyarakat sebagai agen utama perubahan, memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memberdayakan dan memberi suara kepada komunitas lokal.

3. METODE PENELITIAN

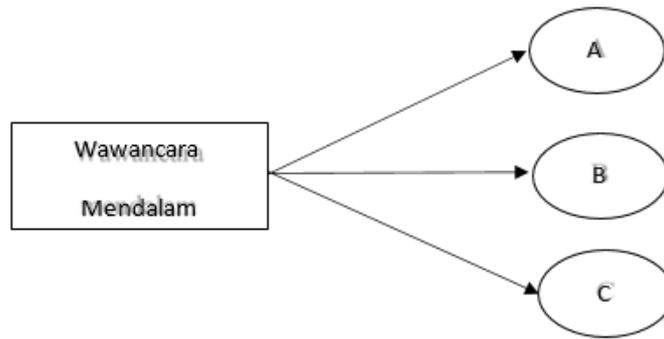
Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara *purposive*. Desa Wisata Jatiluwih dipilih karena merupakan warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2012 dengan potensi luar biasa dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT), namun partisipasi masyarakatnya masih belum optimal (Dewi, dkk.,2013). Informan kunci dalam penelitian meliputi tokoh masyarakat, pengelola desa wisata, dan anggota komunitas yang terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan yang relevan (Kumar, 2018). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi data dengan kesesuaian hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Triangulasi diartikan sebagai penggabungan teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Ketika peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka peneliti juga mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiono, 2011).

Menggunakan teknik Triangulasi berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda satu dengan lainnya untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama dan serempak.



Gambar 1. Triangulasi “tehnik” (pengumpulan data dari sumber yang sama)



Gambar 2. Triangulasi "sumber" (data dari berbagai macam sumber)

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan tahapan menurut Sugiono (2017), meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggali dinamika partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Jatiluwih. Reduksi data artinya meringkas data, memilih dan mengfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Tujuan agar data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data, dan mencarinya sesuai kebutuhan. Penyajian data bisa dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lainnya. Penyajian data ini akan memudahkan pembaca untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiono, 2011).

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dilakukan beberapa teknik analisis data untuk mendapat data yang akurat mengenai penerapan komunikasi partisipatif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi partisipatif memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Jatiluwih. Komunikasi partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk akses, *voice*, dan kontrol terbukti memberikan dampak positif pada partisipasi masyarakat. Penerapan komunikasi partisipatif di DTW Jatiluwih

mencakup tiga dimensi utama yaitu akses, *voice* dan kontrol, yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Pada dimensi akses, komunikasi antara pengelola dan masyarakat lokal dilakukan melalui diskusi, baik secara formal maupun informal. Menurut I Gede Alitoyo Winaya, Asisten 2 Pengelola DTW Jatiluwih, diskusi informal sering dilakukan di Balai Desa atau Balai Banjar, yang menjadi tempat strategis untuk bertukar pikiran. Ia menyatakan, "Biasanya kami melakukan diskusi di pulung-pulung balai desa atau balai banjar." Di sisi lain, diskusi formal diwujudkan melalui rapat terbuka berkala yang melibatkan tokoh-tokoh penting masyarakat, seperti kepala subak dan toko adat. Rapat ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi terkini terkait program-program pengelolaan pariwisata. Ia menambahkan, "Terkadang kami mengadakan rapat khusus setiap tahun atau setiap bulan terkait program-program pengembangan pariwisata. Kami mengundang seluruh masyarakat, atau paling tidak tokoh-tokoh banjar, subak, atau kepala subak. Akses juga tersedia melalui saluran pengaduan, rapat rutin dengan tokoh masyarakat, dan kegiatan event seperti Jatiluwih Festival, yang menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait kekurangan-kekurangan yang ada, seperti jalan sempit, minimnya kantong parkir, dan kemacetan pada musim ramai.

Selain diskusi, *workshop* dan pelatihan juga menjadi bentuk akses masyarakat terhadap informasi dan peningkatan kapasitas. *Workshop* ini berfokus pada topik-topik yang mendukung pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal, seperti pelatihan keterampilan dan pengelolaan potensi wisata desa. "Biasanya *workshop* atau pelatihan-pelatihan dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal," tambahnya.

Dimensi *voice* mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan ide, aspirasi, dan kekhawatiran terkait program pariwisata. Keluhan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi bagian dari dimensi ini, seperti yang terungkap dalam wawancara terkait masalah yang ada di jatiluwih. Beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mencakup sempitnya akses jalan dari Penebel menuju Banjar Kesambi, minimnya kantong parkir, serta kemacetan yang terjadi pada musim ramai. Rapat menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog. I Gede Alitoyo Winaya menjelaskan, "Melalui rapat-rapat, masyarakat menyampaikan ide, pendapat, dan kekhawatiran. Misalnya, di akhir tahun kami melaksanakan rapat untuk penyerapan ide dari masyarakat. Jika memungkinkan, ide-ide tersebut akan diimplementasikan pada tahun berikutnya".

Hal ini menunjukkan bahwa pengelola tidak hanya membuka ruang komunikasi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memengaruhi arah kebijakan dan keputusan yang akan diambil. Proses ini menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengembangan pariwisata desa, memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan komunitas lokal.

Suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Jatiluwih sangat signifikan. Ketika masyarakat merasa diundang dan diterima dalam pertemuan, mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di Desa Jatiluwih merasa lebih diberdayakan ketika aspirasi mereka ditampung dalam forum-forum seperti rapat banjar dan diskusi terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat dan kepala subak. Bramwell dan Sharman (1999) serta Patterson dan Pan (2014) menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada sejauh mana suara masyarakat lokal didengar dan diperhatikan.

Selanjutnya pada dimensi kontrol mengacu pada mekanisme evaluasi program yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pariwisata berbasis kearifan lokal. Menurut I Gede Alitoyo Winaya, evaluasi program dilakukan oleh badan pengelola DTW Jatiluwih, yang terdiri dari perwakilan masyarakat lokal, termasuk kepala subak dan tokoh adat. Ia menegaskan, "Yang mengevaluasi terkait dengan program-program adalah badan pengelola, yang merupakan perwakilan dari masyarakat, seperti kepala subak, masyarakat adat, dan sebagainya. Badan inilah yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi." Selain itu, kontrol juga diberikan kepada generasi muda melalui keterlibatan mereka dalam pembuatan video promosi, yang mempengaruhi citra dan branding pariwisata di Jatiluwih.

Proses evaluasi ini penting untuk menilai apakah program yang dijalankan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan apakah ada kebutuhan untuk penyesuaian di masa mendatang. Dengan adanya representasi masyarakat dalam badan pengelola, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DTW Jatiluwih dapat terjaga. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk merencanakan program-program baru yang lebih relevan dan efektif.

Kontrol dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Jatiluwih menunjukkan adanya kesenjangan antara mereka yang memiliki akses formal dan mereka yang tidak terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan. Kontrol ini sering kali dikuasai oleh segelintir individu yang dianggap mewakili masyarakat, seperti kepala subak dan tokoh adat. Fenomena ini menciptakan kesenjangan dalam distribusi kontrol,

yang mengarah pada ketidakpuasan masyarakat yang merasa suaranya tidak didengar. Masalah serupa juga ditemukan di desa wisata lain di Kabupaten Klungkung, di mana kontrol pengelolaan pariwisata sering kali terbatas pada beberapa individu yang memiliki akses formal, sementara banyak anggota masyarakat lainnya tidak diberikan kesempatan untuk berperan aktif.

Penelitian "*Governance Model for Inclusive Tourism Village Development in Klungkung Regency*" mengembangkan model tata kelola yang mengacu pada paradigma manajemen modern dan teori tata kelola kolaboratif, yang terintegrasi dengan sistem masyarakat desa. Model ini menawarkan solusi untuk mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih dan desa wisata lain yang menghadapi tantangan serupa. Komponen tata kelola desa wisata inklusif yang diusulkan meliputi faktor pendorong untuk partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan tradisional yang menghubungkan masyarakat dengan pengambilan keputusan, serta desain kelembagaan yang mendukung keterlibatan masyarakat lokal. Pendekatan ini juga menekankan penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal, serta menciptakan ruang bagi masyarakat marginal untuk berpartisipasi. Model tata kelola ini relevan untuk diterapkan di Desa Wisata Jatiluwih guna mengurangi kesenjangan kontrol dan mewujudkan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tosun (2000) menekankan bahwa keterbatasan dalam partisipasi komunitas di negara berkembang sering kali disebabkan oleh kurangnya mekanisme yang memungkinkan semua suara untuk didengar. Hal ini juga terjadi di Desa Wisata Jatiluwih, di mana tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang lebih inklusif dalam kontrol pengembangan pariwisata, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan program-program yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Cole (2006), kontrol yang inklusif akan lebih menciptakan keberlanjutan dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Komunikasi partisipatif, yang mencakup akses, *voice*, dan kontrol, merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Jatiluwih dapat berjalan secara berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun implementasi komunikasi partisipatif sudah memberikan dampak positif, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan terkait kesenjangan dalam distribusi kontrol, di mana tidak semua individu atau kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini

mengindikasikan perlunya mekanisme yang lebih inklusif untuk memastikan semua suara masyarakat didengar dengan adil.

Oleh karena itu, untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal, sangat penting untuk terus meningkatkan komunikasi partisipatif di Desa Wisata Jatiluwih. Dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, terutama yang kurang terwakili, untuk menyampaikan ide, kekhawatiran, dan aspirasi mereka, maka pengelolaan pariwisata tidak hanya akan mencerminkan keberagaman suara komunitas, tetapi juga akan memaksimalkan potensi keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih memiliki akses yang baik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. Hal ini terlihat melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, seperti diskusi informal di balai desa dan rapat formal yang melibatkan tokoh masyarakat. Melalui saluran ini, masyarakat dapat menyampaikan ide, masukan, dan keluhan mereka secara langsung. Selain itu, pelaksanaan *workshop* dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat turut memperkuat akses mereka terhadap informasi dan pengetahuan terkait pariwisata. Suara masyarakat juga sangat dihargai dalam proses pengambilan keputusan, di mana mereka diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui forum-forum seperti rapat dan diskusi terbuka. Aspirasi ini kemudian dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pengelolaan pariwisata. Dengan adanya kesempatan ini, masyarakat merasa lebih diberdayakan karena dapat memengaruhi arah kebijakan yang menyangkut desa mereka. Namun, dari sisi kontrol, mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam evaluasi program masih belum sepenuhnya inklusif. Kendali utama sering kali berada di tangan segelintir individu atau kelompok, seperti kepala subak dan tokoh adat, yang menyebabkan ketidakpuasan pada sebagian masyarakat karena merasa suara mereka kurang didengar dalam proses evaluasi dan pengawasan program pengembangan pariwisata.

Untuk memperbaiki kondisi ini, ada beberapa langkah yang disarankan. Dalam aspek akses, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keberagaman saluran komunikasi agar semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang terwakili, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Langkah ini dapat diwujudkan melalui pengenalan lebih banyak forum komunikasi informal dan formal yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam hal suara, perlu ada penguatan partisipasi aktif

masyarakat di setiap tahap perencanaan dan evaluasi program pariwisata. Aspirasi masyarakat harus ditampung secara sistematis dan berkelanjutan dengan mengakomodasi berbagai pendapat dari seluruh kelompok masyarakat. Sementara itu, untuk aspek kontrol, penting bagi pengelola pariwisata untuk melibatkan lebih banyak perwakilan masyarakat dalam badan pengelola dan evaluasi program. Langkah ini bertujuan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan keinginan masyarakat luas, sehingga pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Jatiluwih dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan tokoh adat dan organisasi-organisasi lokal seperti Pecalang, Subak, Karang Taruna, pengelola DTW Jatiluwih, Sekaa Teruna Teruni (STT), yang memiliki peran strategis dalam mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, diharapkan tercipta sistem manajemen pariwisata yang lebih partisipatif, berpihak kepada keberlanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Bramwell, B., & Sharman, A. (1999). Collaboration in local tourism policy making. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 392–415.
- Cole, S. (2006). Information and empowerment: The role of stakeholders in sustainable tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 14(5), 473–490. <https://doi.org/10.2167/jost556.0>
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Eko Sutoro. (2015). *Regulasi baru desa baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kumar, R. (2018). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners* (5th ed.). SAGE Publications.
- Kustiawan, W., Fauzizah, N. A., Sinaga, H. A. B., Oktavia, I., Hafizah, F., Shaliha, F., & Habib, F. (2023). Konsep komunikasi partisipatif dalam komunikasi pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4082–4086.
- Patterson, I., & Pan, C. (2014). Community voice in tourism development: The case of local stakeholders in sustainable tourism. *Tourism Management*, 44, 193–204. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.04.003>
- Priyandoko, Z., Syarifudin, D., Herlina, E., & Rantini, R. (2023). Potensi desa wisata berbasis partisipasi masyarakat adat di Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 313–329.

- Putra, M. R. A., Iswara, A. R. P., Fasya, M. N., & Furqan, A. (2023). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di Kampung Wisata Karst Rammang-Rammang, Kabupaten Maros. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 789–808. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i2.2625>
- Rakhmadani, R. (2021). Komunikasi pembangunan partisipatif dalam pengembangan Desa Wisata Sajen Edu Adventure melalui pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 25(1), 33–44. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v25i1.159>
- Sugiono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumetri, N. W., Astawa, I. P. M., Wahyuni, L. M., & Rumini, N. L. P. I. (2022, December). Governance model for inclusive tourism village development in Klungkung Regency. In *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (iCAST-SS 2022)* (pp. 602–608). Atlantis Press.
- Tiaraningrum, H. A. (2023). *Komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Studi penerapan komunikasi partisipatif Desa Adat Penglipuran dalam pengembangan sebagai desa wisata)* [Tesis, Universitas Brawijaya].
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.
- Wesnawa, I. G. A. (2022). Pengembangan pariwisata perdesaan Bali: Integrasi potensi, kearifan lokal dan ekonomi kreatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 149–160.
- Widiastuti, S., et al. (2022). Factors affecting community-based tourism success in Jatiluwih, Bali. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 20(4), 1–15.